

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, 2017, "***Pengantar Ilmu Hukum***", Jember : Universitas Jember.
- Awan Y Abdoellah, 2016, "***Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*** ", Bandung : Alfabeta.
- Anggara Sahya. 2008, "***Kebijakan Publik*** ", Bandung : Pustaka Setia
- Bachtiar, 2018 "***Metode Penelitian Hukum***", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, "***Penelitian Hukum (Legal Research)***", Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017 . "***Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi***" Bandung: ALFABETA.
- Mardalis, 2008, "***Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal***" Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftahul Huda. 2012 "***Ilmu Kesejahteraan sosial (Paradigma Dan Teori)***". Yogyakarta: SAMUDRA BIRU.
- Nitaria Angkasa. Dkk, 2019, "***Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar***", Lampung. CV.LADUNY ALIFATAMA.
- Pujiastuti, Endah. 2008, "***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan***" , Semarang : Semarang University Press
- Puspitojati Triyono, Dkk. 2017, "***Hutan Rakyat***" , Sleman: PT.KANISIUS
- Rujehan. 2019. Pengantar Manajemen Hutan. Samarind ; Mulawarman University Press
- Sarintan Efratani Damanik, 2019, "***Perencanaan Pembangunan Kehutanan***", Ponorogo :Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sulaiman, Abdullah, 2019, "***Pengantar Ilmu Hukum***", Jakarta:UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta).

Taufiqurokhman. 2014. “ **Kebijakan Publik**”, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Yulia Neta, Dkk. 2019, “ **Hutan Kemasyarakatan** “ Bandar Lampung : Pusaka Media

JURNAL

Laksemi, Ni Putu Sekar T Dkk,” **Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)**”, Bandung: Jurnal Sylva Lestari Vol. 7 No. 2, Mei 2019 (150-163),

Prasetyaningtyas, pita, “ **Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan**”. Malang : Universitas Malang

Munawar Noor, 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Semarang, Jurnal Ilmiah Civis, Volume 1 No 2 Juli 2011

Rahayu, Eni Mukti, Joko Triwanto. 2021, “**Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang**”, Malang : Jurnal Budimas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan sosial.

WAWANCARA

Wita, Kepala Desa Asemrudung, Wawancara Pribadi pada tanggal 17 November 2022

Perum Perhutani, Wawancara Pribadi pada 10 November 2022

Santosa (Ketua LMDH Sumber Rejeki Desa Asemrudung) Wawancara Pribadi pada 2 Desember 2022

Anhary Ahmad Nur Sarif (Anggota Kelompok Tani hutan) wawancara Pribadi pada 13 November 2022

WEBSITE

Andrean W. Finaka” *Hutan Sosial Untuk Masyarakat*”Indonesia baik, <https://indonesiabaik.id/infografis/hutan-sosial-untuk-masyarakat-1> 2017.

Majalah

OCR. *INDIVIDUAL NEEDS IN HEALTH AND SOCIAL CARE*. M/600/6874

